



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 05 November 2025

Halaman: 2

TERAS

Penataan Trotoar

PENATAAN trotoar yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Yogyakarta terus dilakukan. Meskipun PKL adalah bagian penting dari ekonomi lokal, keberadaan mereka di trotoar menimbulkan dilema. Pemerintah harus memilih antara mempertahankan citra keramahan terhadap rakyat kecil, atau menegakkan aturan demi mengembalikan fungsi ruang publik dan menjaga martabat sebagai kota pariwisata.

Trotoar secara hukum adalah hak absolut pejalan kaki dan seharusnya diprioritaskan untuk keselamatan serta kenyamanan mereka. Namun di banyak titik strategis, trotoar telah dikuasai gerobak dan dagangan PKL. Kondisi ini memaksa pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas dan wisatawan, untuk turun ke badan jalan yang merupakan ancaman keselamatan dan pelanggaran hak sasi atas ruang publik yang aman.

Pengakuan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia menuntut Yogyakarta untuk menjunjung tinggi keteraturan dan keindahan. Kawasan ini menjual keindahan sejarah dan ketenangan budaya, namun trotoar yang semrawut oleh PKL dan polusi visual menciptakan pengalaman wisata yang buruk. Jika hak pejalan kaki diabaikan, citra pariwisata Yogyakarta sebagai kota yang berbudaya dan nyaman akan tergerus, berpotensi kontraproduktif terhadap upaya pelestarian warisan dunia tersebut.

Perubahan harus dilakukan, tetapi tidak boleh hanya sekadar pengusuran. Pemerintah harus mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, mengakui bahwa PKL juga berhak mencari nafkah. Solusi dapat berupa dialog partisipatif dengan PKL dan penyediaan ruang usaha alternatif yang memadai, terintegrasi, dan memiliki potensi pendapatan yang setara dengan lokasi semula, seperti upaya relokasi yang sudah pernah dilakukan di kawasan Makaboro.

Sudah saatnya Pemerintah Kota dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil tindakan tegas dan konsisten untuk menegakkan peraturan dengan mengembalikan fungsi trotoar sepenuhnya untuk pejalan kaki. Yogyakarta harus membuktikan bahwa statusnya sebagai Kota Budaya dapat berjalan harmonis dengan keteraturan ruang publik. Prioritas harus diberikan kepada kaki (pejalan kaki), bukan kaki lima, demi keselamatan warga, kenyamanan turis, dan menjaga martabat Sumbu Filosofi sebagai pusat peradaban yang tertib. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005